



Jamkesda baru terserap 60%

Oleh Yuspita Anjar Palupi
 HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Dari total anggaran Rp3,6 miliar yang disediakan oleh Pemerintah Kota (pemkot) Jogja untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), hingga saat ini baru terserap sekitar 60% untuk pembiayaan rawat inap, rawat jalan, dan rujukan.

"Jamkesda tidak bisa 100% karena sifatnya bantuan. Jadi tidak semua pembiayaan harus gratis. Jamkesda pembiayaan pendampingan dari Jamkesmas," terang Ketua Jamkesda, Kusminatun kepada wartawan, Jumat (23/1).

Ia menerangkan pemberian Jamkesda tetap menerapkan 2 prinsip utamanya, yakni kendali mutu

dan kendali harga. Yang berarti klaim yang masuk sesuai dengan aturan akan diverifikasi. Dan pemberian klaim akan disesuaikan dengan tarif yang ada dari pusat.

"Bagi warga miskin yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan. Tapi memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) maka jaminan kesehatannya akan dijamin dengan Jamkesda," tuturnya.

Lebih lanjut Kusminatun mengatakan ketidakterserapan Jamkesda ini salah satunya terjadi di kalangan Guru Tidak Tetap (GTT) dari swasta. Dari kuota sebanyak 5.000 jiwa, yang sudah terdata baik secara *by name* dan *by address* baru sekitar 2.000 jiwa.

"Tidak terserap karena kartu belum diterima. Dan hingga De-

seMBER kemarin baru 3 orang yang mengajukan klaim kepada kami," kata dia.

Dengan kondisi semacam itu, diharapkan pada 2009 ini sosialisasi keberadaan Jamkesda untuk para GTT dari swasta diharapkan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan Jamkesda oleh para GTT dari swasta bisa lebih baik.

Terkait penolakan yang dilakukan oleh sejumlah rumah sakit akibat warga tidak memiliki kartu Jamkesos ataupun Jamkesmas, Kusminatun menyakinkan pelayanan kepada masyarakat masih tetap terlayani dengan hanya menggunakan KMS. "Untuk masyarakat miskin yang tidak punya Jamkesos masih bisa dilayani dengan KMS," tegasnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Jogja, Chang Wendryanto menegaskan agar Jamkesda bisa mengcover dan terserap oleh keluarga miskin (gakin) di Kota Jogja. Oleh karena itu patokan kepemilikan KMS untuk pelayanan Jamkesda dinilai tidak adil. Karena kenyataannya banyak gakin yang tidak memiliki KMS.

"Tujuan Jamkesda kan untuk orang miskin. Jadi jangan kepemilikan KMS jadi patokannya. Jika mereka memang terbukti miskin meski tidak memiliki KMS ya harus dibantu," tegasnya.

Jika perlu, pemerintah melakukan verifikasi di lapangan. Menanyakan kepada RT dan RW setempat apakah yang bersangkutan memang terbukti miskin.

Walikota Yogyakarta
 Wakil Walikota Yogyakarta
 Sekretaris Daerah
 Asisten

Dihaturkan Kepada Yth. :

Terbusan Kepada Yth :

INSTANSI

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
3. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 09 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005